

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia menyatakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan dimulai di awal tahun 2016. Pasar bebas ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan Asia Tenggara. Setelah melalui beberapa rangkaian pertemuan, akhirnya ASEAN menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya akan membentuk pasar tunggal ASEAN yang lebih dinamis dan kompetitif. Pembentukan pasar tunggal ini bertujuan untuk memfasilitasi pergerakan orang dan bisnis, pergerakan bebas tenaga kerja yang terampil dan berbakat, mempercepat sektor investasi yang menjadi prioritas, serta memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN.

Mengingat semakin pentingnya persiapan menyambut era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tantangan dan ancaman yang akan dihadapi lulusan SMK akan semakin besar. Berdasarkan data BPS, Sakernas Bulan Agustus tahun 2019, menunjukkan pengangguran terbuka di Daerah Jawa Barat sebanyak 14,53% orang merupakan pengangguran berasal dari SMK Kejuruan dan merupakan penyumbang pengangguran tertinggi dibandingkan SD, SMTP, Diploma, maupun Universitas. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan SMK masih ragu dan belum siap untuk terjun di dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi lulusan SMK masih belum sesuai dengan standar bahkan berada di bawah standar sehingga belum mampu diterima dunia usaha dan dunia industri. Permasalahan ini akan menarik untuk diselesaikan jika ingin meningkatkan kualitas daya saing SDM di Indonesia.

Pemerintah melalui Undang–Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta PP No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional menekankan pentingnya Sertifikasi Kompetensi menurut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. Kompetensi kerja merupakan kebutuhan dan

Mochamad Arief Hidayah, 2020

RELEVANSI UJI KOMPETENSI KEAHLIAN SMK BIDANG TEKNIK ELEKTRO DENGAN UJI KOMPETENSI SESUAI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) DI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kepentingan bersama yang tidak bisa dipisahkan antara seluruh pemangku kepentingan seperti lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi, asosiasi profesi, asesor, instruktur serta professional/praktisi di bidangnya. Sertifikasi Kompetensi juga bertujuan untuk mewujudkan SDM Indonesia yang berdaya saing tinggi dan siap terjun ke era globalisasi dan menghadapi MEA. Sumber daya ekonomi saat ini adalah manusia yang berpengetahuan, manusia yang kompeten, dan berketerampilan dan bukan lagi sumber daya alam. Sekjen Kemenperin, Haris Munandar (2018) menyatakan bahwa dunia sedang mengarah pada revolusi industri keempat atau Industri 4.0.

Kompetensi calon tenaga kerja dan tenaga kerja teknisi bidang listrik ketenagaan dapat ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi. Cara untuk memastikan dan membuktikan bahwa seseorang kompeten untuk suatu bidang pekerjaan adalah dilakukan asesmen dan uji kompetensi kepada yang bersangkutan. Uji kompetensi harus dilakukan oleh asesor kompetensi yang berasal dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP untuk melaksanakan asesmen sesuai pedoman BNSP di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah terverifikasi. Peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus akan diberikan Sertifikat Kompetensi yang berlaku untuk jangka waktu 3 tahun. Dengan demikian, uji kompetensi merupakan bagian dari proses Sertifikasi Kompetensi Kerja yang harus dilakukan secara sistematis, obyektif dan mengacu kepada SKKNI.

Untuk dinyatakan lulus dari jenjang pendidikan SMK, siswa harus mengikuti UKK sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan sertifikat sesuai program Kejuruan yang diambil oleh masing-masing siswa. UKK dapat dilaksanakan menggunakan standar yang ditetapkan oleh industri, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan/atau perangkat uji yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Tempat-tempat uji kompetensi. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) harus dinyatakan layak sebagai tempat uji kompetensi oleh koordinator Ujian Nasional Tingkat Provinsi atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Sebagaimana tahun sebelumnya, nilai Uji kompetensi Keahlian akan diperhitungkan sebagai Nilai Ujian Sekolah untuk mata pelajaran kompetensi kejuruan. Oleh karena itu dengan

analisis dari relevansi uji kompetensi guna untuk mengetahui relevansi uji kompetensi sekolah dengan uji kompetensi sesuai LSP.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membuat penelitian skripsi dengan judul **“Relevansi Uji Kompetensi Keahlian SMK Bidang Teknik Elektro Dengan Uji Kompetensi Sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

Mengetahui hasil Relevansi Uji Kompetensi SMKN 4 Bandung dengan Uji Kompetensi sesuai SKKNI keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik dalam segi Materi Uji yang diberikan sekolah, dalam segi prosedur dan segi Tempat Uji Kompetensi dengan pedoman yang diberikan oleh BNSP dan LSP guna kebutuhan untuk mempersiapkan sertifikasi kompetensi keahlian di masa yang akan datang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini fokus permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi uji kompetensi keahlian (UKK) di sekolah menengah kejuruan dengan uji kompetensi berbasis SKKNI di LSP dari segi materi uji?
2. Bagaimana relevansi uji kompetensi keahlian (UKK) di sekolah menengah kejuruan dengan uji kompetensi pedoman BNSP di LSP dari segi prosedur?
3. Bagaimana relevansi uji kompetensi keahlian (UKK) di sekolah menengah kejuruan dengan uji kompetensi pedoman BNSP di LSP dari segi kriteria tempat uji kompetensi (TUK)?

1.4 Batasan Masalah

Dari pemamparan rumusan masalah di atas maka diperlukan batasan masalah untuk membatasi penelitian ini agar lebih spesifik dan terarah.

Batasan-batasan masalah yang akan penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan tentang relevansi dari materi uji kompetensi, prosedur, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sesuai dengan SKKNI, pedoman dari prosedur uji kompetensi dan tempat uji kompetensi umum Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
2. Penelitian dilakukan hanya kepada guru Instalasi Penerangan program keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL).
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada mata pelajaran Instalasi Penerangan.
4. Penelitian dilakukan di SMKN 4 Bandung.
5. Penelitian ini dipilih karena merupakan masalah yang memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk mengetahui apakah uji kompetensi sekolah relevan dengan SKKNI dan BNSP atau tidak.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui relevansi materi uji kompetensi keahlian sekolah apakah sesuai dengan SKKNI dari skema sertifikasi yang diujikan.
2. Untuk mengetahui relevansi prosedur uji kompetensi keahlian sekolah dengan prosedur pedoman BNSP.
3. Untuk mengetahui relevansi kriteria tempat uji kompetensi keahlian di sekolah dengan tempat uji kompetensi umum BNSP.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan maupun pembaca pada umumnya. Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti, memperluas khazanah keilmuan, wawasan, gambaran mengenai relevansi uji kompetensi sekolah dan unit kompetensi peserta uji kompetensi di LSP Ketenagalistrikan, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya.
2. Bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, memberikan gambaran keadaan faktual mengenai hasil uji kompetensi, serta memberikan masukan positif kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran di jurusan agar sesuai dengan unit kompetensi BNSP yang dibutuhkan di dunia kerja sebagaimana

prinsip pendidikan kejuruan yang *link and match* (terhubung dan sesuai) sehingga dapat mencetak lulusan yang kompeten, kompetitif dan siap kerja. Selanjutnya lembaga pendidikan dan pelatihan dapat menambah kualitas dan intensitas pendidikan dan pelatihan terutama pada unit kompetensi yang dinyatakan belum kompeten.

3. Bagi guru, sebagai bahan masukan guna memperluas wawasan tentang uji kompetensi yang berbasis dengan LSP dalam upaya menjadikan uji kompetensi sekolah menjadi uji kompetensi berbasis LSP.
4. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan dalam menerapkan inovasi uji kompetensi, guna meningkatkan mutu pendidikan.

1.7 Struktur Organisasi Skripsi

Pada skripsi kali ini disusun kedalam lima bab, masing–masing bab diuraikan sebagai berikut, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi

BAB II KAJIAN PUSTAKA, membahas mengenai teori–teori Sertifikasi Kompetensi Kerja, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Uji kompetensi, prosedur, TUK serta hasil penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN, membahas mengenai desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksa keabsahan data dan prosedur penelitian,.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN, membahas mengenai temuan apa saja yang didapatkan saat penelitian, khususnya mengenai penataan ruang praktik yang sesuai standar.

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI, membahas tentang simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan penelitian terhadap hasil analisis temuan penelitian.